

**RANGKAP JABATAN MENTERI KABINET
INDONESIA MAJU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



ARYA AWATRA MEIZAR

**RANGKAP JABATAN MENTERI KABINET
INDONESIA MAJU DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008
TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H)

OLEH :

Arya Awatra Meizar

NIM : 2011150018

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SOEKARNO BENGKULU
TAHUN 2023**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU**
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu
Telp. (0736) 51276-51171-51172


HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi yang ditulis oleh ARYA AWATRA MEIZAR, NIM 2011150018 dengan judul "**Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyash Dusturiyah**". Program Studi Hukum Tata Negara Jurusan Syariah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Januari 2024 M
1444 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H
NIP.196503071989031005


Edi Mulyono, M.E. Sy
NIP.198905122020121007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jl. Raden Fatah Kelurahan Pagar Dewa
Kota Bengkulu Telp. (0736) 51276-51171-51172

PENGESAHAN

Skripsi disusun **ARYA AWATRA MEIZAR**, NIM : 2011150018 yang berjudul **“Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyash Dusturiyah.”**

Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 16 Januari 2024


Dan dinyatakan **LULUS**, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu,

2024 M

1444 H

Dekan,


Prof. Dr. Suwarjin, S. Ag. M.A

Nip. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris


Prof. Dr. Iman Mahdi, S.H. M.H

NIP. 196503071989031005


Edi Mulyono, M.E. Sy

NIP. 198905122020121007

Penguji I

Penguji II


Dr. Rohmadi, S. Ag. MA

NIP. 197103201996031001


Ade Kosasih, SH., MH

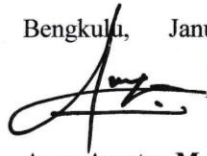
NIP. 198203182010011012

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis skripsi yang berjudul: **“Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah”** adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukrano maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis Skripsi ini murni gagasan, pemikiran serta ide saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari orang lain kecuali dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis, kecuali dikutip secara tulis dan jelas dicantumkan sebagai acuan di dalam nsakah saya dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan pada Daftar Pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpanan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Januari 2024



Arya Awatra Me:
NIM. 2011150018



MOTTO

*“Jadilah Seperti Mata Air Jernih, Karena Bisa Berguna
Bagi Siapapun dan Dimanapun”*

(Penulis)

“Maka sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. Al- Insyirah: 5)



PERSEMBAHAN

Puji syukur dan terimakasih kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan Kesehatan, kesabaran, pemikiran dan ilmu untukku dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan lancar, serta skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tuaku, Ayah (Nizarkawi) dan Ibu (Sekarwati), terimakasih karena telah selalu sabar mengajarku dalam berbagai hal, selalu memberikan nasehat yang positif, dan selalu menyebut namaku di setiap do'anya.
2. Terimakasih kepada orang yang paling aku sayangi Rina Polama Okta Sari, Sheiza Awatra Nurmeiza, dan Rafardhan Awatra Atallah yang selalu mendukung dan menyemangati saya.
3. Keluarga Besar dari kedua orang tua saya yang selalu mendukung saya.
4. Teman seperjuangan saya M. Zikri dan M. Aufa Multazam.



ABSTRAK

Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasah Dusturiyah, oleh: Arya Awatra Meizar, NIM. 2011150018, Pembimbing I: Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. dan Pembimbing II: Edi Mulyono, M.E., Sy.

Pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin, menteri-menterinya yang tergabung di dalam kabinet Indonesia maju, terdapat beberapa menteri yang melakukan rangkap jabatan. Adanya menteri yang melakukan rangkap jabatan di pemerintahan Jokowi, tidak terlepas dari diizinkan menteri tersebut untuk merangkap jabatan oleh Jokowi. Padahal sebenarnya perihal larangan rangkap jabatan sudah diatur di dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara. Untuk itu, ada dua persoalan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu: 1) Bagaimana kedudukan hukum menteri rangkap jabatan pada kabinet Indonesia maju, 2) Bagaimana kedudukan hukum menteri rangkap jabatan pada kabinet Indonesia maju berdasarkan perspektif siyasah dusturiyah. Untuk mengungkap persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis, dengan menggunakan metode pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) yang disajikan secara sistematis dengan menggunakan kajian fiqh siyasah dusturiyah. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa: 1) Menteri yang merangkap jabatan dalam Kabinet Indonesia Maju jika dilihat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara, secara yuridis kedudukan menteri tersebut tidak legal karena sudah melanggar Undang-Undang. Undang-Undang yang dilanggar yaitu Pasal 23 yang berbunyi

menteri dilarang rangkap jabatan sebagai pejabat negara lain, komisaris, dan direksi pada perusahaan negara/swasta, pimpinan organisasi yang dibiayai oleh APBN/APBD. Bila dilihat dari asas *Equality Before The Law*, maka menteri yang melakukan rangkap jabatan sudah bersifat *inprinsipil*. Menteri yang merangkap jabatan juga sudah merampas hak orang lain, karena setiap orang memiliki kesempatan yang sama. Dengan demikian, menteri yang merangkap jabatan sudah melanggar asas legal binding dikarenakan sudah melanggar undang-undang, yang mana di dalam undang-undang tersebut sudah dijelaskan bahwasanya menteri dilarang untuk melakukan rangkap jabatan. 2) Berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyyah* mengenai menteri rangkap jabatan itu hal yang dilarang karena akan mengakibatkan pembagian kekuasaan dan dinilai haus akan kekuasaan. Seharusnya menteri sebagai pemimpin harus bisa mencontohkan perilaku yang baik dalam memimpin dan terbebas dari adanya pelanggaran yang dapat mencederai tata kelola negara yang baik *Good Governance*. Dari paparan di atas dapat disimpulkan secara yuridis, kedudukan menteri tersebut tidak legal, tetapi keberadaannya dianggap sah dan diakui oleh negara.

Kata Kunci: Menteri, Rangkap Jabatan, Kabinet, Kedudukan, Siyasah Dusturiyyah

ABSTRACT

Concurrent Positions of Minister of Advanced Indonesian Cabinet in Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries Siyasah Dusturiyah Perspective, by: Arya Awatra Meizar, NIM. 2011150018, Advisor I: Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H., M.H. and Advisor II: Edi Mulyono, M.E. Sy.

In the Jokowi-Ma'ruf Amin government, the ministers who were members of the advanced Indonesian cabinet, there were several ministers who held concurrent positions. The existence of ministers holding concurrent positions in Jokowi's government is inseparable from Jokowi's permission to hold concurrent positions. In fact, the prohibition on holding multiple positions is regulated in Article 23 of Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries. For this reason, there are two issues studied in this thesis, namely: 1) What is the legal position of ministers holding concurrent positions in the advanced Indonesian cabinet. 2) How does the legal position of ministers holding multiple positions in the Indonesian cabinet progress based on the perspective of siyasah dusturiyah. To reveal this problem in depth and comprehensively, the researcher used a descriptive analysis method, using a statutory approach method (Statute Approach), a conceptual approach (Conceptual Approach) which was presented systematically using the study of fiqh siyasah dusturiyah. Based on the results of the research that has been carried out, it can be concluded that: 1) Ministers who hold concurrent positions in the Advanced Indonesia Cabinet, if seen in Law Number 39 of 2008 concerning State Ministries, juridically the minister's position is not legal because it has violated the law. The law that was violated was Article 23 which states that ministers are prohibited from holding concurrent positions as other state officials, commissioners and directors in state/private companies, heads of organizations funded by the APBN/APBD. If we look at it from the principle of Equality Before the Law, then ministers who hold concurrent positions are already acting in principle. Ministers who hold concurrent positions have also robbed other people of

their rights, because everyone has the same opportunities. In this way, ministers who hold concurrent positions have violated the principle of legal binding because they have violated the law, which in the law explains that ministers are prohibited from holding concurrent positions. 2) Based on the study of siyasah dusturiyyah fiqh regarding ministers holding multiple positions, this is prohibited because it will result in a division of power and is considered to be thirsty for power. Ministers as leaders should be able to exemplify good behavior in leading and be free from violations that could harm good state governance. From the explanation above, it can be concluded that legally, the minister's position is not legal, but his existence is considered legal and recognized by the state

Keywords: Minister, Double Job, Cabinet, Standing, Siyasah Dusturiyah



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rangkap Jabatan Menteri Kabinet Indonesia Maju Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementerian Negara Perspektif Siyasa Dusturiyah”**.

Shalawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad SAW, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara (HTN) Jurusan Syariah Pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dan berbagai pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang telah memberikan fasilitas kepada penulis untuk dapat belajar di kampus UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Prof. Dr. Suwarjin, M.A Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah putra, M. Sos selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (HTN) Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Prof. Dr. Imam Mahdi, S.H.,M.H selaku Pembimbing I dan Edi Mulyono, M.E. Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak membantu memberikan sumbangan pikiran dan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak dan Ibu Dosen fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan
6. Pejabat dan Staf administrasi fakultas syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan Pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua Pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan Skripsi ini, tentu tidak luput dari khilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi untuk meningkatkan kualitas yang lebih baik Skripsi ini kedepannya.

Bengkulu, Januari 2024

Penulis

Arya Awatra Meizar

NIM. 2011150018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN	iv
MOTTO.....	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu	8
F. Metode Penelitian	13
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Tinjauan Negara Hukum	16
1. Teori Negara Hukum	16
2. Teori Sistem Pemerintahan	17
B. Tinjauan Umum Jabatan dan Menteri.....	18
1. Definisi Jabatan.....	18
2. Macam-macam Jabatan	20
3. Rangkap Jabatan.....	21
4. Definisi Pejabat Negara	22
5. Jenis Pejabat Negara	22
6. Definisi Menteri.....	24
7. Tugas Menteri.....	25
8. Legal Binding dan Moral Binding	25
C. Tinjauan Umum Siyasah Dusturiyah.....	26
1. Definisi <i>Siyasah Dusturiyah</i>	26
2. Ruang Lingkup <i>Siyasah Dusturiyah</i>	29
3. Sumber Hukum <i>Siyasah Dusturiyah</i>	31

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

- A. Kedudukan Hukum Menteri Rangkap Jabatan Pada Kabinet Indonesia Maju34
- B. Kedudukan Hukum Menteri Rangkap Jabatan Pada Kabinet Indonesia Maju Perspektif Siyash Dusturiyah.....49

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan55
- B. Saran.....56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

